



Teater kekejaman kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pemberitaan penangkapan kepala BGN Dadan Hindayana di media Kompas.com pada bulan Juni 2026 terkait korupsi BGN: Perspektif Jacques Derrida

Farhan Ramadhan Maulana^{1*}, Fathan Hazami², Nabil Athaillah Saifani³, Rifma Ghulam Dzaljad⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia

*Email: farhanrm711@gmail.com, fathanhazami123@gmail.com,
nathailahsaifani@gmail.com, rifmaghulam@uhamka.ac.id

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, munculnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala BGN pada Juni 2026 memunculkan berbagai interpretasi kritis terhadap implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi makna dalam pemberitaan Kompas.com mengenai penangkapan Kepala BGN terkait dugaan korupsi MBG melalui perspektif dekonstruksi Jacques Derrida. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks dekonstruksi. Data penelitian berupa berita-berita Kompas.com yang membahas kasus dugaan korupsi BGN selama Juni 2026. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi oposisi biner, kontradiksi makna, jejak (trace), *différance*, dan logosentrisme yang muncul dalam teks pemberitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Kompas.com tidak hanya merepresentasikan kasus korupsi sebagai peristiwa hukum, tetapi juga membuka ruang pembacaan kritis terhadap narasi resmi negara mengenai kesejahteraan dan kepedulian sosial. Melalui proses dekonstruksi ditemukan adanya ketegangan makna antara idealitas program MBG sebagai instrumen pemenuhan gizi masyarakat dengan realitas praktik birokrasi yang diwarnai dugaan penyimpangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa makna kebijakan publik tidak pernah bersifat tunggal dan final, melainkan selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan interpretasi yang diproduksi melalui praktik media.

Kata Kunci: *Dekonstruksi, Jacques Derrida, Kompas.com, Makan Bergizi Gratis, Media Massa.*

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis/MBG) is one of the Indonesian government's strategic policies aimed at improving public nutrition through the National Nutrition Agency (Badan Gizi Nasional/BGN). However, allegations of corruption involving the Head of BGN in June 2026 generated critical interpretations regarding the implementation of the policy. This study aims to analyze the construction of meaning in Kompas.com's news coverage of the arrest of the Head of BGN in relation to the alleged corruption case through Jacques Derrida's deconstruction perspective. The research

employs a qualitative approach using deconstructive text analysis. The data consist of Kompas.com news articles discussing the alleged corruption within BGN during June 2026. The analysis focuses on identifying binary oppositions, contradictions of meaning, trace, différance, and logocentrism embedded in the news texts. The findings reveal that Kompas.com's coverage does not merely portray corruption as a legal issue but also provides a critical reading of the state's official narrative concerning welfare and social care. Through the process of deconstruction, the study uncovers tensions between the idealized representation of the MBG program as a public welfare initiative and the bureaucratic realities marked by alleged irregularities. This study concludes that the meaning of public policy is never singular or fixed but remains open to multiple interpretations produced through media discourse.

Keywords: Deconstruction, Jacques Derrida, Kompas.com, Free Nutritious Meal Program, Mass Media.

PENDAHULUAN

Media massa tidak lagi dianggap sebagai media yang hanya menyampaikan fakta secara objektif; sekarang dianggap sebagai lembaga yang turut membentuk realitas melalui proses pemilihan, penonjolan, dan penyusunan berita. Menurut paradigma konstruktivisme, realitas yang diterima masyarakat adalah hasil dari konstruksi media yang dilakukan melalui pemilihan fakta, penggunaan bahasa, dan penekanan pada elemen tertentu dari peristiwa. Oleh karena itu, berita berfungsi sebagai representasi dari pandangan, motivasi, dan ideologi media daripada menggambarkan realitas secara langsung (Berger & Luckmann, 1966; Eriyanto, 2012).

Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan beberapa kebijakan strategis pemerintah, salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat umum, terutama peserta didik. Implementasi MBG, yang merupakan program prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang besar, mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media massa. Ketika Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program MBG pada Juni 2026, perhatian tersebut meningkat. Peristiwa tersebut tidak hanya dianggap sebagai tindakan penegakan hukum terhadap seorang pejabat negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola kebijakan, akuntabilitas penyelenggaraan program, dan keberlanjutan program pemerintah yang sangat baik.

Kasus penangkapan Kepala BGN menjadi salah satu masalah yang paling banyak dibahas di berbagai media online nasional. Setiap media memberi penekanan yang berbeda pada peristiwa tersebut menurut perspektif editorialnya. Bacaan awal artikel di Kompas.com menunjukkan bahwa media tersebut tidak hanya memberitakan tentang proses hukum penangkapan Kepala BGN, tetapi juga sering mengaitkannya dengan masalah tata kelola Program MBG, pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional, dugaan modus korupsi, dan dampak pada kepercayaan publik dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, berita yang diposting oleh Kompas.com tidak hanya menyampaikan fakta hukum, tetapi juga membangun cerita yang lebih luas tentang tanggung jawab penyelenggaraan kebijakan publik.

Pembingkai, atau framing, adalah cara media memilih fakta dan menonjolkan bagian tertentu dari suatu peristiwa dari sudut pandang komunikasi. Menurut Robert N. Entman, framing dilakukan melalui proses mendefinisikan persoalan (define problems), mengidentifikasi penyebab (diagnose causes), memberikan penilaian moral (make moral judgement), dan menyarankan penyelesaian (suggest treatment). Melalui proses ini, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengubah cara khalayak

memahami dan memahami peristiwa.

Tetapi framing tidak selalu berarti satu hal. Jacques Derrida berpendapat bahwa konsep dekonstruksi memungkinkan berbagai interpretasi karena setiap teks selalu mengandung kontradiksi, oposisi biner, dan jejak makna (*trace*). Media dapat membuat makna yang tidak stabil karena selalu dapat dibaca ulang, yang dapat mengungkap kepercayaan, kepentingan, dan narasi dominan di balik teks. Oleh karena itu, setelah analisis framing menemukan pembingkai berita, pembacaan dekonstruktif diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan MBG, akuntabilitas negara, dan legitimasi pemerintah dibangun dan dipersoalkan secara bersamaan dalam teks berita.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggunakan model framing Robert N. Entman untuk menganalisis pemberitaan Kompas.com tentang penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Kemudian, berdasarkan perspektif Jacques Derrida, pembingkai tersebut dibongkar. Diharapkan analisis ini akan membantu menjelaskan bagaimana media mengonstruksi realitas sekaligus menunjukkan bahwa arti yang dibangun dalam pemberitaan tidak pernah menjadi satu, tetapi selalu terbuka untuk berbagai interpretasi.

METODE PENELITIAN

Paradigma konstruktivisme digunakan sebagai metodologi penelitian kualitatif. Paradigma konstruktivisme berpendapat bahwa realitas sosial dibentuk oleh proses interaksi sosial, praktik komunikasi, dan bahasa daripada sebagai sesuatu yang abadi dan objektif. Dalam konteks media massa, berita dianggap sebagai produk konstruksi yang dipengaruhi oleh perspektif, relevansi, dan proses yang digunakan media untuk menampilkan peristiwa (Berger & Luckmann, 1966; Eriyanto, 2012). Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada bagaimana media mengonstruksi makna penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Metode yang digunakan adalah analisis framing model Robert N. Entman yang dipadukan dengan perspektif dekonstruksi Jacques Derrida. Analisis framing digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana Kompas.com membingkai peristiwa melalui empat elemen utama, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (identifikasi penyebab), *make moral judgement* (penilaian moral), dan *treatment recommendation* (rekomendasi penyelesaian) (Entman, 1993). Hasil analisis framing kemudian dibaca secara dekonstruktif menggunakan konsep-konsep Jacques Derrida, seperti oposisi biner, *trace*, *différance*, *supplement*, dan logosentrisme, untuk mengungkap kontradiksi, makna yang tersisihkan, serta kemungkinan interpretasi lain yang tersembunyi dalam teks media (Derrida, 1976; Derrida, 1982).

Fokus penelitian adalah tujuh berita Kompas.com yang membahas penangkapan Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipublikasikan pada Juni 2026. Fokus berita Pemilihan Kompas.com pada proses hukum dan hubungannya dengan tata kelola Program MBG, pergantian kepemimpinan BGN, dugaan modus korupsi, dan dampak pada akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan publik. Ketujuh berita ini dipilih secara acak karena secara langsung membahas bagaimana kasus berkembang, mulai dari penetapan tersangka, penyidikan, penggeledahan, hingga evaluasi operasi Program MBG.

Data primer penelitian berupa teks berita dari tujuh situs berita di Kompas.com yang menjadi subjek penelitian. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai literatur, artikel ilmiah, dan buku yang membahas konstruksi media, analisis framing,

dekonstruksi Jacques Derrida, dan komunikasi politik sebagai landasan konseptual penelitian.

Analisis data dilakukan dalam dua fase. Pada tahap pertama, model framing Robert N. Entman digunakan untuk menganalisis teks berita untuk menemukan bagaimana Kompas.com mendefinisikan masalah, menentukan penyebabnya, memberikan penilaian moral, dan menawarkan penyelesaian atas kasus penangkapan Kepala BGN. Pada tahap kedua, hasil dari analisis ini dikonstruksi menggunakan perspektif Jacques Derrida. Pada titik ini, fokus analisis adalah untuk menemukan oposisi biner, trace, différance, supplement, dan logosentrisme yang membentuk konstruksi makna dalam berita. Pada tahap ini, penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana pemberitaan media menciptakan realitas sosial dan memungkinkan berbagai interpretasi alternatif di balik narasi yang tampak dominan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Framing Pemberitaan Kompas.com terhadap Penangkapan Kepala BGN

Kompas.com menyajikan berita tentang penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berita ini tidak hanya menampilkan perkembangan hukum yang sedang berlangsung, tetapi juga menceritakan tentang tata kelola kebijakan publik, akuntabilitas penyelenggaraan program, dan konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap keberlanjutan Program MBG. Berdasarkan tujuh berita yang dianalisis, Kompas.com secara Pola pemberitaan menunjukkan bahwa Kompas.com melihat kasus penangkapan Kepala BGN sebagai masalah tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan publik selain sebagai masalah pidana. Untuk memahami konstruksi makna tersebut, penelitian ini terlebih dahulu mengidentifikasi pembingkai berita menggunakan model framing Robert N. Entman. Kemudian, penelitian ini mendekonstruksi makna yang dibangun dalam berita menggunakan perspektif Jacques Derrida.

Analisis tujuh artikel Kompas.com tentang penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa ada pembingkai yang membuat kasus tersebut menjadi masalah hukum dan tata kelola kebijakan publik. Pemberitaan selalu mengaitkan penegakan hukum dengan pelaksanaan Program MBG, sehingga penangkapan dianggap sebagai tanda ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan ideal dan pelaksanaannya di lapangan. Dalam hal ini, Program MBG dimaksudkan untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi siswa. (Wibisono & Santosa, 2026). ditunjukkan sebagai kebijakan yang menghadapi tantangan yang signifikan karena masalah tata kelola dan dugaan penyimpangan. Hasil awal ini kemudian dianalisis dengan menggunakan model framing Robert N. Entman untuk menemukan pola pembingkai berita. Kemudian, temuan ini didekonstruksi menggunakan perspektif Jacques Derrida.

Define Problems (Pendefinisian Masalah)

Hasil analisis yang dilakukan oleh Kompas.com terhadap tujuh artikel yang membahas penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menunjukkan bahwa Kompas.com menyampaikan kasus tersebut sebagai masalah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta sebagai peristiwa hukum yang melibatkan seorang pejabat negara. Fakta bahwa media sering mengaitkan penetapan tersangka, penahanan, dan penggeledahan kantor BGN dengan masalah pengelolaan anggaran, pengawasan, dan keberlanjutan program menunjukkan pembingkai ini (Entman, 1993), Media membingkai realitas dengan memilih bagian tertentu dari suatu

peristiwa sehingga bagian tersebut lebih menonjol dalam membentuk pemahaman khalayak.

Dalam pemberitaan tentang penangkapan Dadan Hindayana, dari Dugaan Modus hingga Disorot Media Asing, pola ini ditunjukkan; pemberitaan tersebut menampilkan kronologi penangkapan Dadan Hindayana serta dugaan kesalahan dalam pengelolaan Program MBG. Akibatnya, kasus korupsi digambarkan sebagai masalah yang membahayakan kredibilitas program pemerintah. Ini sejalan dengan perspektif Erianto (2012), yang menyatakan bahwa framing adalah teknik yang digunakan media untuk memilih fakta dan memberikan penekanan khusus untuk mempengaruhi pemahaman khalayak tentang suatu peristiwa.

Berita tentang Kasus BGN dan Momentum Perbaikan Tata Kelola Anggaran Negara, serta Mensesneg: Penggeledahan di BGN Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola MBG, mengubah fokus pemberitaan dari individu pelaku ke pentingnya evaluasi sistem pengelolaan anggaran dan penguatan tata kelola Program MBG. Pergeseran fokus ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta hukum tetapi juga membangun cerita.

Hasilnya, berdasarkan model framing Robert N. Entman, menunjukkan bahwa penangkapan Kepala BGN digambarkan sebagai masalah tata kelola kebijakan publik yang mempengaruhi legitimasi Program Makan Bergizi Gratis. Menurut konstruktivisme, realitas yang disajikan media diciptakan melalui proses pemilihan dan penonjolan fakta tertentu (Berger & Luckmann, 1966). Akibatnya, Kompas.com tidak hanya memberikan interpretasi tentang tindakan pidana yang dilakukan individu, tetapi juga mengonstruksi masalah tersebut sebagai krisis akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan publik.

Diagnose Causes (Penyebab)

Menurut analisis yang dilakukan oleh Kompas.com terhadap tujuh berita, sumber utama dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) bukanlah kegagalan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi kegagalan tata kelola yang buruk, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya akuntabilitas manajemen program. Kompas.com mendorong pembaca untuk memahami bahwa masalahnya berada pada praktik pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan kelembagaan, bukan tujuan kebijakan MBG itu sendiri, melalui pemilihan fakta, narasumber, dan penekanan pada masalah. Menurut Entman (1993), Media membuat hubungan sebab-akibat melalui proses diagnose causes, yang berarti menemukan aktor atau komponen yang dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi.

Dalam artikel berjudul "Sederetan Fakta Penangkapan Dadan Hindayana, dari Dugaan Modus hingga Disorot Media Asing", yang menguraikan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG, Kompas.com menampilkan informasi tentang dugaan penyalahgunaan mekanisme pengadaan dan pengelolaan anggaran, membantu pembaca memahami bahwa korupsi adalah hasil dari kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program. Akibatnya, sumber masalah bukan hanya tindakan individu, itu terkait dengan sistem pengelolaan yang memungkinkan penyimpangan.

Berita tentang Kasus BGN dan Momentum Perbaikan Tata Kelola Anggaran Negara, serta Mensesneg: Penggeledahan di BGN Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola MBG, menegaskan betapa pentingnya melakukan evaluasi tata kelola anggaran dan meningkatkan mekanisme pengawasan untuk menangani dugaan korupsi. Konstruksi penyebab tersebut diperkuat oleh kedua berita tersebut. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com menganggap kelemahan sistem pengendalian dan tata kelola kelembagaan sebagai penyebab masalah hukum yang muncul di BGN.

Selain itu, berita Kompas (2026) yang berjudul 5 "Dosa" Eks Kepala dan Wakil

BGN yang Diungkap oleh Kejaksaan membahas berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat BGN. Ini mengonstruksi alasan kasus. Penyajian tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan kerugian negara dan menurunkan kredibilitas Program MBG. Dari perspektif framing, pemilihan elemen-elemen tersebut menunjukkan bagaimana media memilih fakta tertentu untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat peristiwa (Eriyanto, 2012).

Make Moral Judgement

Analisis yang dilakukan oleh Kompas.com terhadap tujuh berita menunjukkan bahwa berita tentang penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tidak hanya memberikan informasi tentang proses hukum, tetapi juga memberikan penilaian moral tentang bagaimana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan. Penekanan pada integritas, akuntabilitas, dan transparansi, serta tanggung jawab pejabat publik dalam mengelola anggaran negara, menunjukkan penilaian tersebut. Menurut Entman (1993), Ketika media menyajikan suatu peristiwa kepada khalayak, mereka memberinya penilaian moral.

Berita berjudul "Kepala BGN Dicopot, KSP: Presiden Ingin Tak Ada Korupsi" menunjukkan penilaian moral tersebut. Kompas.com menegaskan bahwa korupsi tidak dapat ditoleransi dalam berita ini, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas penyelenggaraan negara. Pernyataan tersebut tidak hanya memberikan informasi tentang sikap pemerintah, tetapi juga membangun gagasan bahwa pejabat negara memiliki kewajiban moral untuk menjalankan amanah publik dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.

Berita berjudul "5 "Dosa" Mantan Kepala dan Wakil BGN yang Diungkap Kejaksaan menunjukkan pola yang sama. Banyak dugaan pelanggaran yang diajukan oleh pejabat BGN menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan adalah pelanggaran tata kelola pemerintahan yang baik. Kompas.com memperkuat persepsi bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran etika penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemilihan istilah, penyusunan kronologi, dan penjelasan mengenai dugaan pelanggaran.

Selain itu, berita tentang kasus BGN, Momentum Perbaikan Tata Kelola Anggaran Negara, dan Mensesneg: Pengeledahan di BGN Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola MBG menunjukkan bahwa proses hukum dilihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran negara. Dengan demikian, berita tidak hanya menganggap tindakan pelaku sebagai sesuatu yang salah, tetapi juga menekankan bahwa pemerintah harus melakukan reformasi tata kelola untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap beroperasi.

Jika kita melihat dari perspektif framing, penonjolan nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa media tidak sekadar menyampaikan fakta; mereka juga membentuk cara khalayak melihat dan menilai suatu peristiwa (Eriyanto, 2012). Sebab, elemen membuat keputusan moral dalam berita Kompas.com menunjukkan bahwa kasus dugaan korupsi di BGN dianggap sebagai masalah integritas penyelenggara negara, yang berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan membuat konstruksi ini, Kompas.com membangun gagasan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tujuan program, tetapi juga oleh komitmen moral para aktor yang berpartisipasi dalam program tersebut.

Treatment Recommendation (Rekomendasi Penyelesaian)

Analisis yang dilakukan oleh Kompas.com terhadap tujuh artikel berita

menunjukkan bahwa rekomendasi penyelesaian yang dibuat oleh media belum menyebabkan proses penegakan hukum terhadap Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan pejabat lainnya. Untuk memastikan keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kompas.com secara konsisten menekankan pentingnya reformasi tata kelola, peningkatan sistem pengawasan, evaluasi pengelolaan anggaran, dan pergantian kepemimpinan. Dalam model framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman (1993), unsur *treatment recommendation* menunjukkan bagaimana media membingkai solusi yang dianggap tepat dalam menyelesaikan suatu persoalan sehingga mampu memengaruhi cara khalayak memandang penyelesaian atas suatu peristiwa.

Berita tentang Kasus BGN dan Momentum Perbaikan Tata Kelola Anggaran Negara, serta Mensesneg: Penggeledahan di BGN Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Anggaran MBG, menggambarkan dugaan korupsi sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan, meningkatkan mekanisme pengawasan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran Program MBG. Fokus pemberitaan sekarang beralih dari kasus hukum terhadap orang-orang tertentu menjadi kasus yang lebih luas.

Selain itu, berita Kepala BGN Dicopot, dilaporkan oleh KSP: Presiden Ingin Tak Ada Korupsi, menunjukkan bahwa pergantian pimpinan merupakan bukti komitmen pemerintah untuk menjaga integritas penyelenggaraan program. Di sisi lain, berita Usai Prabowo Dicopot Semalam, Eks 3 Pimpinan BGN Ditahan dan Kenakan Rompi Pink menunjukkan bahwa tindakan hukum dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola Program MBG.

Temuan sejalan dengan penelitian (Novatrianda & Vera, 2024), tentang bagaimana pemberitaan tentang kasus korupsi di Kompas.com menunjukkan bahwa media cenderung mengaitkan penyelesaian kasus korupsi dengan penegakan hukum yang diikuti dengan perbaikan tata kelola dan penguatan akuntabilitas lembaga. Dengan kata lain, media tidak hanya menyampaikan kasus korupsi sebagai selesainya kasus, tetapi juga membangun cerita tentang pentingnya reformasi kelembagaan untuk mencegah korupsi terulang.

Berdasarkan analisis model framing Robert N. Entman, elemen saran perawatan di pemberitaan Kompas.com menunjukkan bahwa penyelesaian kasus dugaan korupsi di BGN dianggap sebagai proses yang harus mencakup dua aspek sekaligus: penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat dan reformasi tata kelola kelembagaan. Kompas.com menyadari bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya tergantung pada penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk meningkatkan sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap kebijakan.

Dekonstruksi Pemberitaan Kompas.com terhadap Penangkapan Kepala BGN dalam Kasus Dugaan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

Hasil analisis framing Robert N. Entman menunjukkan bahwa Kompas.com secara konsisten menggambarkan penangkapan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai masalah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), daripada hanya tindak pidana seseorang. Kompas.com membangun narasi yang menempatkan kasus korupsi sebagai krisis akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan publik melalui proses pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Namun, menurut dekonstruksi Jacques Derrida, makna yang diciptakan media tidak pernah lengkap. Setiap teks selalu mengandung kontradiksi, ketegangan, dan kemungkinan interpretasi lain yang tersembunyi di balik makna utama

(Derrida & Spivak, 2016).

Oleh karena itu, analisis dekonstruksi dilakukan untuk menunjukkan bagaimana makna Program Makan Bergizi Gratis dibangun melalui oposisi-oposisi biner, bagaimana makna tersebut berubah terus-menerus, meninggalkan jejak, dan bagaimana tambahan mengubah makna utama kebijakan. Oleh karena itu, dekonstruksi tidak berusaha untuk menemukan makna yang benar atau salah; sebaliknya, itu menunjukkan bahwa teks berita selalu dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda (Culler, 1982). Metode ini memungkinkan penelitian untuk menunjukkan bahwa kisah MBG tidak hanya menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menunjukkan bagaimana maknanya dipertentangkan oleh masalah korupsi, akuntabilitas, dan tata kelola yang menjadi topik utama pemberitaan Kompas.com.

Oposisi Biner dalam Pemberitaan Kompas.com

Analisis framing menunjukkan bahwa Kompas.com membuat berita tentang penangkapan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dengan menggunakan berbagai oposisi yang berbeda untuk membantu pembaca memahami dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jacques Derrida menggambarkan oposisi biner sebagai cara berpikir di mana dua konsep diposisikan secara berlawanan, di mana salah satu konsep memiliki dominasi yang lebih besar daripada yang lainnya (Derrida & Spivak, 2016). Dengan melakukan dekonstruksi, oposisi tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang mutlak, tetapi dibongkar untuk menunjukkan bahwa kedua konsep itu saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan.

Menurut analisis yang dilakukan terhadap tujuh artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com, ada beberapa oposisi biner yang sering dibangun dalam berita: kesejahteraan versus korupsi, akuntabilitas versus penyalahgunaan kewenangan, kepentingan publik versus kepentingan pribadi, dan keberhasilan kebijakan versus kegagalan tata kelola. Tujuan awal program MBG adalah sebagai kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, setelah berita tentang dugaan korupsi di BGN muncul, artinya berubah karena berita lebih banyak berfokus pada integritas, transparansi, dan pengelolaan anggaran negara.

Tampak bahwa oposisi antara kesejahteraan dan korupsi adalah yang paling dominan dalam pemberitaan. Di satu sisi, MBG dilihat sebagai bukti kepedulian negara terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, tuduhan korupsi yang melibatkan pejabat BGN memberi makna yang berbeda, yang menyebabkan kontradiksi dalam interpretasi kebijakan. Menurut Derrida (2016), Tidak ada satu makna yang benar-benar penting karena setiap makna selalu dibentuk oleh makna lain yang berada dalam posisi berlawanan.

Trace

Kompas.com membingkai penangkapan Dadan Hindayana sebagai rangkaian krisis MBG-BGN yang bergerak cepat dari pencopotan jabatan, penggeledahan, penetapan tersangka, hingga penahanan. Frame ini menonjolkan kegagalan tata kelola, dugaan korupsi, dan kebutuhan pemulihan legitimasi melalui hukum dan pergantian pimpinan. Melalui penekanan pada urgensi waktu, pencopotan jabatan, dan penahanan tersangka, Kompas.com membentuk framing bahwa MBG bukan lagi semata program kesejahteraan, melainkan ruang yang memperlihatkan jejak kekerasan simbolik dan keruntuhan makna kebijakan; dalam kerangka Derrida, narasi ini membongkar klaim stabilitas negara atas program publik. *Pertama*, Obyek peristiwa. Peristiwa yang dibingkai adalah penangkapan dan penahanan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana oleh Kejagung, yang diberitakan Kompas.com pada 2–3 Juni 2026 dalam konteks dugaan

korupsi MBG/BGN. *Kedua*, Penonjolan isu. Framing diarahkan ke tiga titik utama: krisis tata kelola MBG, dugaan korupsi dalam pengelolaan BGN, dan respons aparat hukum. Penonjolan ini membuat isu bukan sekadar penangkapan individu, tetapi juga problem institusional dan moral kebijakan publik.

Ketiga, Penyebab yang ditampilkan. Artikel Kompas.com mengaitkan pencopotan Dadan dengan masalah pelaksanaan standar operasional prosedur dan kualitas makanan, lalu memperluasnya ke dugaan penyimpangan pengelolaan MBG serta korupsi titik SPPG. *Keempat*, Solusi. Solusi nya adalah penegakan hukum, audit internal, dan pergantian pimpinan. Dalam teks Kompas.com, pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang dan penyebutan audit internal menunjukkan upaya pemulihan legitimasi lembaga. *Kelima*, Evaluasi. Dengan pilihan diksi seperti "kontroversi", "bermasalah", dan "ditahan", berita membangun penilaian bahwa peristiwa ini bukan sekadar proses hukum, tetapi juga kegagalan etika kelembagaan dalam menjalankan program public

Difference

Différance sebagai Penundaan Makna (Deferral): Dari Realitas Gizi ke Panggung Hukum. Konsep Différance menyatakan bahwa makna tidak pernah hadir sepenuhnya pada saat ini (presence); ia selalu ditunda melalui rantai tanda-tanda lain. Dalam konteks Teater Kekejaman kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), esensi utama program ini seharusnya adalah perut anak bangsa yang lapar dan pemenuhan gizi dengan analisis sebagai Kekejaman yang riil (anak-anak yang kehilangan hak gizinya akibat korupsi) secara teatrikal ditunda dan digantikan oleh teater penangkapan kilat. Fokus publik dipindahkan secara instan ke dalam dramatisasi waktu ("tak sampai 10 jam") dan simbol visual ("rompi pink"). Rompi pink dan hitungan jam berfungsi sebagai tanda baru yang menunda kita untuk melihat korban nyata dari kebijakan ini. Media menampilkan "kekejaman hukum" demi menutupi kekejaman sosial yang terjadi di lapangan.

Différance sebagai Perbedaan (Differing): Kontras Logika Subsistensi vs Surplus Korupsi. Différance menciptakan ruang perbedaan di mana sebuah makna dipahami karena ia bukan sesuatu yang lain. Teater Kekejaman MBG hidup dari kontradiksi ekstrem yang diciptakan oleh oposisi biner ini. Dengan analisis sebagai dosa dosa yang diungkap oleh Kejagung menciptakan jurang perbedaan (differing) yang kejam: di satu sisi ada retorika tentang program MBG sebagai penyelamat generasi, namun di sisi lain terdapat daftar pengadaan fasilitas mewah (seperti TV 75 inci, motor listrik, tablet, dll. yang di-mark-up). Secara dekonstruktif, teks berita ini menunjukkan bahwa kebijakan MBG tidak pernah berdiri sendiri sebagai entitas murni "kemanusiaan". Kehadiran program gizi ini justru memuat absennya integritas, di mana "makanan gratis" hanya bisa dipahami secara kontras melalui kehadiran "insentif miliaran" yang mengalir ke yayasan-yayasan terafiliasi.

Supplement

Dalam teori dekonstruksi Jacques Derrida, konsep suplemen (le supplément) memiliki sifat yang paradoks. Di satu sisi, suplemen hadir sebagai sesuatu yang ditambahkan dari luar untuk melengkapi atau memperkaya sesuatu yang dianggap sudah utuh. Namun di sisi lain, kehadiran suplemen justru menyingkapkan adanya cacat bawaan, lubang, atau kekurangan (lack) yang mendasar pada entitas yang "dilengkapinya" tersebut. analisis suplemen terhadap Teater Kekejaman kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam skandal korupsi Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjerat Dadan Hindayana pada Juni 2026 berdasarkan pemberitaan Kompas.com

Korupsi dan Hukum sebagai Suplemen yang Menyingkap Lubang Kebijakan

Kebijakan MBG awalnya diposisikan sebagai sebuah teks yang utuh, adekuat, dan membawa misi kemanusiaan yang paripurna untuk mengatasi stunting dan kelaparan.

Namun, penangkapan Dadan Hindayana bertindak sebagai suplemen yang kejam. Menyingkap Kekosongan Sistem: Kehadiran berita penangkapan kilat ("tak sampai 10 jam") dan penahanan eks 3 pimpinan BGN dengan rompi pink pada awalnya tampak sebagai "suplemen penegakan hukum" untuk menyempurnakan jalannya kebijakan. Namun secara dekonstruktif, suplemen hukum ini justru menyingkapkan bahwa sejak awal, struktur kebijakan MBG rapuh dan menyimpan "lubang" besar yang rentan dimanipulasi melalui mark-up anggaran. Kehadiran yang Menghancurkan: Suplemen di sini tidak sekadar menambah, ia menggantikan. Narasi kesucian program sosial digantikan oleh realitas "5 dosa" eks kepala BGN. Gizi yang seharusnya masuk ke tubuh anak-anak disubstitusi oleh fasilitas mewah (TV 75 inci hingga motor listrik) yang masuk ke kantong birokrat.

Rompi Pink" dan "Momentum": Teater Simbolik yang Menggantikan Substansi

Dalam Teater Kekejaman, simbol-simbol visual digunakan untuk menggoncang kesadaran publik. Melalui kacamata suplemen Derridean, simbol penegakan hukum di media Kompas.com bertindak sebagai penutup atas kegagalan substansial. Dramaturgi Penangkapan: Judul-judul seperti "Usai Dicopot Prabowo Semalam, Eks 3 Pimpinan BGN Ditahan dan Kenakan Rompi Pink" adalah bentuk suplemen teatral. Rompi pink dan kecepatan pencopotan jabatan dihadirkan ke hadapan publik sebagai bukti bahwa pemerintah bertindak tegas. Substitusi Makna: Tontonan hukum ini menjadi suplemen yang menutup fakta mengerikan bahwa jutaan anak kehilangan hak atas makanan bergizi akibat korupsi pengadaan. Kehadiran rompi pink di layar kaca mengalihkan perhatian publik; media tidak lagi memperdebatkan "mengapa sistem MBG bisa kecolongan," melainkan menikmati "teater penghukuman" sang koruptor.

Momentum Perbaikan" sebagai Suplemen Janji yang Menunda Kegagalan

Pernyataan dari KSP yang menekankan bahwa "Presiden ingin tak ada korupsi" serta statemen Mensesneg mengenai "Momentum Perbaikan Tata Kelola MBG" diproduksi sebagai suplemen diskursif untuk menyelamatkan legitimasi rezim. Suplemen Masa Depan: Ketika masa kini dipenuhi oleh skandal korupsi massal di BGN, pemerintah buru-buru menyuntikkan narasi "momentum perbaikan". Kata "momentum" bertindak sebagai suplemen yang menambal retaknya kepercayaan publik. Paradoks Suplemen: Sifat suplemen ini selalu menunda realitas. Kebijakan MBG yang bersih tidak pernah benar-benar hadir saat ini; ia selalu digeser ke masa depan lewat janji "tata kelola yang lebih baik". Korupsi Dadan Hindayana secara ironis dibutuhkan oleh struktur kekuasaan sebagai panggung suplemen untuk menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi internal pemerintah bekerja dengan baik.

Logosentrisme

Analisis Logosentrisme: Menyingkap Pusat Kebenaran yang Semu

Dalam teori dekonstruksi Jacques Derrida, logosentrisme adalah kecenderungan filsafat dan budaya Barat (termasuk narasi institusional) untuk bersandar pada keberadaan suatu "pusat", fondasi mutlak, atau kebenaran tunggal yang dianggap stabil, murni, dan tidak terbantahkan (presence). Teks yang logosentris selalu berusaha menggiring pembaca untuk memercayai satu otoritas makna tertinggi dan mengabaikan kontradiksi di dalamnya. Dalam Teater Kekejaman kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwarnai oleh penangkapan Dadan Hindayana, logosentrisme beroperasi melalui tiga lapis pusat makna yaitu:

Logos "Kesejahteraan Publik" sebagai Kebenaran Utama

Struktur awal kebijakan MBG dibangun di atas logos (pusat kebenaran) bahwa program ini adalah manifestasi murni dari kepedulian negara untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Kebijakan ini diposisikan sebagai

"teks suci" yang tidak boleh cacat. Dekonstruksinya: Pemberitaan Kompas.com mengenai "5 Dosa" eks pimpinan BGN dan penyalahgunaan anggaran membongkar logos tersebut. Kebenaran tentang "kesejahteraan publik" ternyata tidak pernah hadir secara murni (pure presence); ia langsung goyah dan terdekonstruksi oleh realitas birokrasi yang korup. Pusat kebenaran itu runtuh ketika tujuan ideal negara justru didanai oleh praktik pengadaan yang dimanipulasi.

Otoritas Suara Negara (Presiden dan Menteri) sebagai Pusat Penyelamat

Ketika korupsi Dadan Hindayana terungkap, logosentrisme beralih fokus untuk menyelamatkan institusi tertinggi. Media menampilkan kutipan resmi seperti "Presiden Ingin Tak Ada Korupsi" (KSP) atau pernyataan Mensesneg mengenai "Momentum Perbaikan". Di sini, "Suara Pemimpin" (Logos) diposisikan sebagai otoritas moral yang absolut, bersih, dan bertindak sebagai penilai kebenaran hukum. Dekonstruksinya: Derrida menolak superioritas suara (phonocentrism) yang dianggap memuat kebenaran langsung. Pernyataan "Presiden Ingin Tak Ada Korupsi" sebenarnya adalah upaya logosentris untuk mengisolasi kegagalan sistemik. Teks media menunjukkan ketegangan: bagaimana mungkin sebuah lembaga strategis setingkat BGN bisa kecolongan secara masif jika sistem pengawasan yang berpusat pada lembaga kepresidenan itu bekerja dengan mapan? Otoritas moral tersebut sengaja dihadirkan untuk menutupi kelalaian struktural.

Teater Hukum sebagai Pusat Solusi yang Final (Treatment)

Logosentrisme dalam pemikiran birokrasi mengasumsikan bahwa penegakan hukum (penangkapan kilat, pencopotan jabatan, dan pemakaian rompi pink) adalah jawaban akhir yang utuh untuk memulihkan keadaan. Hukum dijadikan logos baru yang seolah-olah dapat membersihkan dan mengembalikan kesucian program MBG seperti sedia kala. Dekonstruksinya: Dekonstruksi menunjukkan bahwa penyelesaian hukum tidak pernah bersifat final atau tunggal. Teater penangkapan ini justru menandakan bahwa makna kebijakan MBG selalu tidak stabil dan terbuka terhadap interpretasi baru. Tindakan hukum spektakuler tersebut hanyalah sebuah tanda buatan untuk menunda (defer) ketakutan publik akan kegagalan masa depan program nasional ini.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa pemberitaan Kompas.com mengenai penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dipahami sebagai representasi realitas yang bersifat netral dan objektif. Melalui perspektif dekonstruksi Jacques Derrida, teks pemberitaan dipahami sebagai ruang produksi makna yang selalu mengandung kontradiksi, ketegangan, dan kemungkinan penafsiran yang beragam. Analisis terhadap pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa narasi mengenai keberhasilan program MBG sebagai instrumen kesejahteraan publik senantiasa berdampingan dengan berbagai persoalan yang muncul dalam praktik implementasinya. Dengan demikian, makna yang dibangun dalam teks berita tidak pernah bersifat tunggal, melainkan selalu terbuka terhadap proses pembacaan ulang yang menghasilkan interpretasi baru.

Hasil penelitian menemukan adanya sejumlah oposisi biner yang mendominasi konstruksi pemberitaan, seperti kesejahteraan dan korupsi, kepedulian dan kelalaian, transparansi dan penyimpangan, serta keberhasilan dan kegagalan kebijakan. Oposisi-oposisi tersebut pada awalnya tampak membentuk hierarki makna yang menempatkan program MBG sebagai simbol keberhasilan negara dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Akan tetapi, melalui pembacaan dekonstruktif ditemukan bahwa hierarki tersebut tidak pernah benar-benar stabil karena selalu diganggu oleh kehadiran fakta-

fakta lain yang memunculkan keraguan terhadap narasi resmi pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa setiap klaim mengenai keberhasilan kebijakan publik selalu mengandung kemungkinan munculnya makna tandingan yang dapat menggugat legitimasi narasi dominan. Melalui konsep *différance*, *trace*, dan *supplement*, penelitian ini juga menunjukkan bahwa makna kebijakan MBG terus mengalami pergeseran seiring munculnya berbagai informasi mengenai dugaan penyimpangan tata kelola program. Dugaan korupsi yang melibatkan pejabat BGN menjadi jejak (*trace*) yang mengungkap keberadaan persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak tampak dalam narasi resmi mengenai keberhasilan program. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa makna kesejahteraan yang dilekatkan pada program MBG tidak pernah hadir secara utuh karena selalu dibayangi oleh ketidakhadiran berupa lemahnya pengawasan, persoalan birokrasi, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan kata lain, pemberitaan media mengungkap bahwa setiap klaim kebaikan dalam kebijakan publik senantiasa mengandung unsur-unsur yang dapat meruntuhkan makna yang dibangunnya sendiri.

Artikel ini menegaskan bahwa media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai arena tempat berlangsungnya pertarungan makna antara berbagai kepentingan sosial dan politik. Pemberitaan Kompas.com dalam kasus ini menunjukkan bagaimana media dapat membuka ruang bagi publik untuk mempertanyakan dan menafsirkan ulang narasi resmi yang dibangun oleh negara. Kehadiran media menjadi penting karena memungkinkan munculnya perspektif-perspektif alternatif yang selama ini berada di luar pusat narasi dominan. Oleh karena itu, media memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap praktik kekuasaan dan penyelenggaraan kebijakan negara. Secara teoritis, artikel ini juga memperlihatkan relevansi pemikiran Jacques Derrida dalam kajian komunikasi dan media kontemporer, khususnya dalam memahami bagaimana teks media membangun serta mendestabilisasi makna suatu peristiwa sosial dan politik. Dekonstruksi tidak dimaksudkan untuk menolak pentingnya Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat, melainkan untuk mengungkap berbagai asumsi dan klaim yang selama ini diterima sebagai kebenaran yang mapan. Melalui pendekatan ini, penelitian berhasil menunjukkan bahwa makna kebijakan publik selalu bersifat dinamis, kompleks, dan tidak pernah final. Dengan demikian, kajian dekonstruksi dapat menjadi alternatif perspektif kritis yang penting dalam memahami relasi antara media, kekuasaan, ideologi, dan pembentukan realitas sosial di era komunikasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Nugroho, A. (2021). Dekonstruksi Jacques Derrida dalam Analisis Teks Media. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 101–115.
- Sari, R., & Hidayat, M. (2022). Pendekatan Dekonstruksi dalam Kajian Media dan Komunikasi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 10(1), 55–68.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books.
- Caesaria, S. D. (2026). 5 “Dosa” Eks Kepala dan Wakil BGN yang Diungkap Kejagung. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2026/06/04/103000465/-5-dosa-eks-kepala-dan-wakil-bgn-yang-diungkap-kejagung?page=all>

- Culler, J. (1982). *On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism*. Cornell University Press.
- Derrida, J., & Spivak, G. C. (2016). *Of Grammatology* (40th Anniv). Johns Hopkins University Press.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS.
- Novatrianda, F., & Vera, N. (2024). Analisis Framing Berita Kasus Dugaan Korupsi Perwakilan PT Timah Refined Bangka Tim (RBT) Harvey Moeis Pada Berita Massa Kompas.com. *ArtComm: Jurnal Komunikasi Dan Desain*, 7(2), 186–195.
<https://doi.org/10.37278/artcomm.v7i2.968>
- Wibisono, M. I., & Santosa, S. (2026). *Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Meningkatkan Ketahanan Gizi Pelajar di Indonesia*. 4(4), 11973–11981.